



MURID BOLEH TAK BERSERAGAM

■ Kelonggaran PTM di Tengah Pandemi

Kita tidak akan memberatkan orang tua siswa, karena ini masih susah pandemi. Kalau sudah tidak punya karena kekecilan misalnya, ya, tidak usah pakai.

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak mewajibkan siswa-siswi, atau peserta pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas untuk memakai seragam. Kelonggaran itu diberikan agar tak membebani perekonomian para orang tua atau wali murid.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Dedi Budiono menjelaskan, pihaknya dapat memahami kondisi siswa setelah hampir dua tahun PTM terhenti akibat pandemi. Sehingga, dipastikan banyak seragam siswa yang kondisinya tak layak pakai.

"Ketentuannya tidak diwajibkan. Tidak ada kewajiban itu, harus pakai seragam dan sebagainya, karena kan pasti ada seragam yang lama sekali tidak dipakai, tahu-tahu sudah gede anaknya," tandas Dedi, Selasa (12/10).

Menurutnya, situasi pandemi Covid-19 ini harus disikapi dengan kebijakan yang

KEBIJAKAN LUWES

- Murid diperbolehkan ke sekolah tak berseragam jika kondisinya tak memungkinkan.
- Faktor lama tak sekolah memunculkan potensi seragam murid sudah sempit.
- Di tengah ekonomi sulit, orang tua jangan sampai terbebani seragam jika memang belum mampu membeli.
- Pakaian siswa boleh bebas asalkan rapi. Tapi bagi yang punya seragam dianjurkan untuk dipakai.
- Murid kembali ke sekolah setelah nyaris 2 tahun PJJ dan penerapan proses menjadi esensi PTM.
- Bagi murid baru SMP pun dibolehkan mengenakan seragam SD jika belum punya seragam biru-putih.
- Bahkan Disdikpor Kulon Progo siap menegur sekolah yang memaksakan muridnya untuk berseragam.

● ke halaman 11

GRAFIS/FAUZIA RAKHMAN

Murid Boleh

● Sambungan Hal 1

luwes. Karena itu, Disdikpora pun menyerahkan sepenuhnya kepada siswa dan tak perlu memaksakan diri mengenakan seragam ke sekolah, seandainya kondisi memang tak memungkinkan. "Kita tidak akan memberatkan orang tua siswa, karena ini masih suasana pandemi. Kalau sudah tidak punya karena kekecilan misalnya, ya, tidak usah pakai," ujarnya.

Hanya saja, berdasarkan pantauan di lapangan, seluruh peserta didik yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara luring, tetap mengenakan seragam. Tapi, dirinya kembali menegaskan, Disdikpora sama sekali tidak mewajibkan dan membebaskan seluruh siswa. "Kalau dari kami, karena kondisinya seperti ini, jangan sudah lusuh atau kekecilan, tidak memakai seragam juga tidak apa-apa kok itu," cetusnya.

Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan, secara keseluruhan, pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar, dan nyaris tanpa kendala. Ia menegaskan, seluruh

sekolah disiplin menerapkan ketentuan terkait protokol kesehatan (prokes)

"Untuk SD juga (PTM) masih kelas VI, belum ada tambahan yang kelas V ke bawah. Banyak yang minta, tapi belum kita putuskan, kita lihat dulu situasinya bagaimana. Semoga tidak ada kendala, ya," pungkas Dedi.

Prokes

Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul, Isdarmoko, menyatakan bahwa pihaknya memperbolehkan para siswa untuk tidak mengenakan seragam karena adanya keterbatasan. Ia memantau ada siswa kelas 7 yang sudah duduk di bangku SMP, tapi masih mengenakan seragam SD, merah putih. "Ya, tidak apa-apa. Hakekatnya kan bukan itu, apalagi ini masa pandemi Covid-19, dan situasi kondisi juga sulit," ujarnya.

Isdar lebih menitikberatkan agar PTM berjalan, namun tetap menjalankan prokes. Maka aturan berse-
ragam pun menjadi fleksibel. Bahkan ia memperbolehkan siswa mengenakan pakaian yang warnanya senada dengan warna seragam.

Disdikpora Bantul tidak melarang anak yang tak berse-
ragam untuk mengikuti PTM. Isdar mengakui bahwa

masih ada siswa yang belum memakai seragam. Namun menurutnya, lambat laun orang tua juga akan berusaha agar anak mereka bisa mengenakan seragam sekolah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pun tidak mewajibkan siswa baru baik SD maupun SMP untuk berse-
ragam. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Ery Widaryana.

Ia mengatakan siswa baru boleh memakai seragam lama. Bahkan pihaknya memperbolehkan siswa memakai baju bebas, asalkan rapi dan sopan. Tidak hanya berlaku di sekolah negeri, kebijakan tersebut juga berlaku di sekolah swasta.

"Seragam tidak wajib, kalau memang tidak punya silahkan memakai seragam SD (untuk SMP). Tetapi kalau sudah punya, ya, lebih baik, silakan dipakai. Kemudian saya keliling, ada juga siswa yang tidak pakai seragam. Tidak apa-apa," katanya, Selasa (12/10).

Kebijakan tersebut diambil karena pandemi Covid-19. Tidak hanya pendidikan, pandemi ini juga berdampak pada ekonomi. Menurut dia, saat ini seragam bukan men-

jadi hal yang esensial. "Yang penting PTM bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan penularan Covid-19. Karena kondisi ekonomi saat ini, jangan dipaksakan (membeli seragam)," sambungnya.

Siap menegur

Kepala Disdikpora Kabupaten Kulon Progo, Arif Pras-towo mengatakan, terkait dengan ketentuan seragam, pihaknya sudah menyampaikan ke semua sekolah setiap awal tahun ajaran. "Bagi siswa yang sudah memiliki seragam dianjurkan untuk memakai seragam. Sementara bagi siswa yang belum berse-
ragam tidak apa-apa," ucap Arif, Selasa (12/10).

Namun bila ditemukan sekolah yang mewajibkan siswanya untuk berse-
ragam, pihaknya akan memberikan teguran ke kepala sekolah yang bersangkutan. Perlu diketahui, PTM di tingkat SMP sudah berlangsung sejak 4 Oktober 2021 lalu. Disdikpora telah mengeluarkan izin PTM ke 50 SMP.

Sementara di tingkat SD mulai 11 Oktober 2021. Total ada 338 SD yang telah terverifikasi oleh tim pengawas. Namun PTM digelar baru di sebagian SD yang wilayahnya berada di zona hijau. (aka/nto/maw/scp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005